

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI NEGARA YANG DILANDA KONFLIK: STUDI KASUS DI PATTANI THAILAND

Nasrullah Djamil^{1*}, Khairunnas Rajab², Helmiati³
¹²³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru
 *Email : nasrullah.djamil@uin-suska.ac.id

Abstract

The Thai government's policy has not been able to run as expected because the Muslim community has responded differently so that it has an impact on the education system in Thailand. This situation reflects the dynamics of interests in different directions between the government and the community. Therefore, this article will identify the development of the Muslim minority in Pattani, Thailand. This writing uses the literature review method, which tells about reviews, summaries, and thoughts on various literature sources. The Muslim community in Thailand faces dynamics in maintaining its faith. The government indirectly develops curriculum and policies to integrate Islam, Nationalism and Buddhist culture.

Keywords: *Pattani, Curriculum, Nationalism, Buddhist Culture*

Abstrak

Kebijakan pemerintah Thailand belum dapat berjalan sesuai harapan dikarenakan ditanggapi secara berbeda oleh masyarakat Muslim sehingga berdampak pada sistem pendidikan di Thailand. Situasi ini mencerminkan dinamika kepentingan dalam arah yang berbeda antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini akan mengidentifikasi perkembangan minoritas Muslim di Pattani, Thailand. Penulisan ini menggunakan metode literature review, yang menceritakan tentang ulasan, rangkuman, dan pemikiran tulisan tentang berbagai sumber kepustakaan. Komunitas Muslim di Thailand menghadapi dinamika dalam mempertahankan kepercayaannya. Pemerintah secara tidak langsung menyusun kurikulum dan kebijakan untuk mengintegrasikan antara agama Islam, Nasionalisme dan budaya Budha.

Kata Kunci : **Pattani, Kurikulum, Nasionalisme, Budaya Budha**

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap negara dan merupakan kebutuhan untuk memodernisasi kehidupan masyarakat (Putro, 2017; Joll, 2010; Jory, 2016). Pendidikan juga investasi yang penting dan memiliki peran strategis bagi terwujudnya manusia sumber daya untuk membentuk pola pikir warga sehingga mereka dapat mengembangkan diri dan membangun sesuatu yang baru di masa depan (Jory, 2016).

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan juga terprogram dalam mempersiapkan siswa untuk mengenali, memahami, dan menjalankan ajaran Islam. Pendidikan dalam perspektif Islam adalah proses panjang yang berfungsi adalah untuk

mengajar sekaligus membantu peserta didik untuk memperoleh berbagai macam aspek ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan dalam Islam melalui perancangan kurikulum yang baik untuk dapat digunakan. (Bafadhol, 2016).

Pendidikan Islam adalah upaya secara menyeluruh yang dapat menciptakan siswa yang tumbuh dan berkembang sebagai umat Islam sesuai Al-Quran dan Hadist dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan suatu bangsa tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah bangsa. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam lembaga pendidikan seperti *madrasah* dan sekolah Islam terpadu mulai muncul. Ini sebagai respons terhadap pola pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan di Asia Tenggara, masing-masing negara membentuk pola pendidikan Islam.

Didalam penelitian ini fokus utama adalah pendidikan Islam pada negara Thailand yang selalu dilanda konflik berkepanjangan. Akar tumbuhnya sikap anti pemerintah pusat yang dilakukan oleh Muslim di Selatan Thailand diakibatkan banyak hal. Kesenjangan ekonomi menjadi kunci atas terus berlangsungnya gerakan “separatisme etnis” atas dominasi kolonialisme internal Thailand. Kesenjangan ini telah berlangsung puluhan tahun. Akibatnya, masyarakat Muslim yang mendapat tekanan politis dan keamanan dari pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Sebagian dari mereka secara diam-diam mendukung gerakan anti-pemerintah. Bahkan beberapa diantara mereka aktif terlibat dalam aksi kekerasan (Helmiati, 2014).

Hal ini disebabkan karena masih membekasnya ingatan masa lalu yang pahit, ditambah oleh kenyataan pemerintah membangun cara pandang yang buruk tentang umat Islam yang berada di kawasan selatan Thai. Hal ini membuat Melayu-Muslim di kawasan tersebut tetap menjaga jarak dengan pemerintah Thailand. Hal ini terindikasi dari cara mereka menjaga kemandirian finansial lembaga pendidikan tradisional pesantren. Dengan menolak menerima bantuan pemerintah agar mereka tidak dapat ditekan dan terbebas dari sikap pemerintah untuk mendikte mereka.

Upaya-upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk mencairkan suasana, salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional (KRN) yang bertujuan untuk memediasi perdamaian di Thailand Selatan. Akan tetapi akibat dominasi militer di Thailand, membuat rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan KRN tidak dapat dilaksanakan. Peluang pekerjaan, sekolah dan pendidikan, dan juga fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak dapat dinikmati oleh Muslim Melayu.

Dalam hal sekolah dan pendidikan, lembaga pendidikan Islam tidak dapat berbuat maksimal sesuai yang diharapkan, meski telah bertahun-tahun warga Muslim yang minoritas di Thailand ini sudah berjuang keras dan mengkomunikasikan aspirasi-aspirasi keagamaannya kepada pemerintah. Akan tetapi tetap saja pemerintah tidak serius menanggapi permintaan tersebut. Akibatnya, pondok pesantren yang dulu berfungsi sebagai tulang punggung identitas dan pertahanan Islam dalam melawan pemerintah pusat, saat ini telah hilang diganti dengan sistem sekolah agama modern (Helmiati, 2014).

TELAAH LITERATUR

A. Minoritas Muslim di Thailand

Thailand, known as a Theravada Buddhist country, has a Muslim minority of up to 8 percent of the population. Muslims form the majority in three southern provinces (Gilquin. M, 2005). Asal-usul agama Islam di Thailand, negara di mana Buddhisme adalah agama resmi. Namun, saat itu, Siam di bawah pemerintahan Raja Narasuan yang membangun hubungan bilateral dengan dua bersaudara dari Persia, yaitu Syekh Ahmad dan Mohammad Said. Dampak dari hubungan bilateral itu, Raja telah menganugerahkan mereka dengan status *Phra Khlung* yang setara dengan status Menteri Perdagangan. Banyak yang masuk Islam melalui pernikahan dan membentuk koloni berpengaruh yang di Authya. Raja Narasuan dikatakan memiliki hubungan yang dekat dengan kedua bersaudara tersebut, sebagai contoh kerajaan memberikan subsidi dalam pembangunan Mesjid pada saat itu. Sebagian besar agama Islam di Thailand memiliki aliran Sunni yang datang sebagai imigran dari berbagai negara Islam di dunia (Ramizah Wan Muhammad, 2006).

Muslim di Thailand disebut dengan istilah *Khaek* (secara harfiah artinya adalah tamu). Istilah tersebut digunakan secara umum di negara Thailand dan sangat tidak disukai oleh Muslim di Thailand. Muslim di Thailand sangat religius dan tidak melihat agama lain sebagai agama yang antagonis. Muslim di Thailand tunduk pada hukum Islam, pada tahun 1901 diumumkan bahwa pada provinsi Satun, Pattani, Yala dan Narathiwat diterapkan hukum Islam (Gilquin. M, 2005).

Jumlah masyarakat Muslim di negara Thailand berjumlah sekitar 7,39 juta, sebagian besar hidup dan tinggal di provinsi selatan Thailand yang berjumlah 6,29 juta jiwa dan sisanya tersebar di provinsi lainnya. Jumlah Mesjid di Thailand adalah 2.918

yang sebagian besarnya sejumlah 2.441 terletak di provinsi selatan Thailand dan sisanya tersebar di provinsi lainnya. Menurut Ramizah Wan Muhammad (2006), Muslim di Thailand meningkat jumlahnya disebabkan karena dua alasan yaitu : 1) tidak mungkin murtad dari agama Islam, dan 2) konversi umat Budha yang masuk agama Islam melalui pernikahan campuran.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa agama Islam merupakan agama yang minoritas di negara Thailand. Masyarakat di negara Thailand mayoritas memeluk agama Budha yang mana agama tersebut adalah agama nenek moyang mereka yang turun temurun mereka percayai hingga saat ini.

B. Budaya, Agama dan Politik di Thailand

Menurut sejarah, sistem politik yang dianut negara Thailand adalah monarki konstitusional dalam format “*pemerintahan Buddhis sekuler*”. Selama beberapa dekade, pemerintah Thailand juga telah menyesuaikan kebijakannya dengan tuntutan agama dan budaya komunitas Muslim. Misalnya, wanita muslimah diperbolehkan memakai hijab, atau jilbab muslim, di foto untuk dokumen resmi seperti KTP dan paspor, untuk bekerja di kantor pemerintahan, dan sejenisnya. Pemerintah telah memfasilitasi pengaturan perjalanan bagi peziarah Thailand ke haji tahunan, menjamin hak untuk menggunakan hukum pribadi Islam di lima provinsi selatan Songkla, Satun, Pattani, Yala, dan Narathiwat, dan memberikan hari libur resmi di selatan untuk perayaan tersebut. hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Negara mendukung organisasi perayaan resmi tahunan *maulid* (lahir Nabi) dan memberikan sertifikasi *halal* untuk produk-produk dari industri makanan Thailand. Akhirnya, pemerintah telah menciptakan kantor *chularajmontri (syaikh al-Islam)* sebagai kepala resmi komunitas Muslim Thailand. Kantor ini mencakup Komite Islam Pusat Thailand dan Dewan Urusan Islam Provinsi, yang mengelola urusan Muslim di tingkat nasional dan provinsi.

C. Sejarah Islam di Thailand

Thailand adalah salah satu negara di wilayah Asia Tenggara yang dalam sejarahnya belum pernah dijajah oleh negara-negara Eropa, seperti negara lainnya yang berada di wilayah Asia Tenggara. Thailand merupakan salah satu anggota *Association South East Asian Nations (ASEAN)*. Pemerintahannya berbentuk kerajaan yang terdiri dari 76 provinsi (*changwat*) yang dikelompokkan kedalam lima kelompok provinsi.

Thailand baru dikenal pada tahun 1939 yang ratusan tahun sebelumnya lebih dikenal dengan nama kerajaan Siam nama historis Thailand).

Wilayah Pattani di Thailand, menunjukkan sebuah provinsi dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan suku melayu. Nama "Pattani" tersebut berasal dari bekas kesultanan Pattani, yang didirikan pada tahun 1390 dan di ambil dengan paksa tanah oleh Siam pada tahun 1902.

Pattani terletak di Semenanjung Melayu dengan pantai Teluk Thailand di sebelah utara. Dibawah kerajaan Islam Melayu Patani dengan raja Sultan Ismail Syah (1488-1511), peradaban umat Islam pernah mengalami kemajuan, kemakmuran dan kemewahan. Tapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah beberapa generasi berlalu pada pertengahan abad ke-18 kerajaan Pattani diserang oleh raja Thai karena iri hati, disebabkan karena wilayah kerajaan Pattani lebih makmur dibandingkan kerajaan Siam. Sejak saat itu kerajaan Pattani masuk dalam bagian kerajaan Thailand.

Pada tahun 1826, penaklukan Siam terhadap Pattani mendapat pengakuan dari Britania Raya. Untuk lebih memperkuat dominasi kerajaan Siam, pada tahun 1902 kerajaan Siam membuat Undang-Undang *Thesaphiban*. Dengan munculnya Undang-Undang tersebut, maka sistem pemerintahan Kesultanan Melayu telah dihapuskan. Sejak penghapusan pemerintahan Kesultanan Melayu Pattani, masyarakat Melayu Pattani berada dalam posisi tertekan dan lemah.

Pattani masuk kedalam bagian wilayah Thai, otomatis mengikuti seluruh aturan yang berlaku. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok, dimana sistem pemerintahan menganut *sistem monarki konstitusional* yang dikepalai oleh seorang Raja dan kepala pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri. Bahasa resmi Thailand adalah Thai, sementara bahasa lainya yang digunakan adalah bahasa Inggris. Mata uang yang digunakan adala Bath dan lagu kebangsaannya adalah *Phleng Chat*.

D. Konflik Islam di Thailand Selatan

Seperti yang diungkap oleh Putthongchai,S (2013), penduduk Melayu telah menjadi korban sebuah pemerintahan yang tidak diperintah dengan baik. Justru akibat pemaksaan inilah kekacauan sering terjadi di Pattani. Pada tahun 1923 Tengku Abdul Kadir Kamaruddin, mantan Raja Melayu Pattani, dengan dukungan pejuang-pejuang Turki, memimpin gerakan pembebasan. Semangat anti Siam menjadi lebih hebat saat

Kerajaan Pibul Songgram (1939-44) mencoba mengasimilasikan kaum minoritas Melayu ke dalam masyarakat Siam melalui Undang-Undang *Rathaniyom*.

Pada masa Perang Dunia II (1939-1945) terjadi gerakan pemberontakan nasionalis Pattani, yang menekankan identitas etnis dan agama Muslim Melayu. Gerakan pemberontakan sering terjadi di Thailand selatan yang berusaha untuk memisahkan wilayah Melayu dari bagian lain negara itu. Meskipun otonomi daerah diberikan kepada daerah provinsi selatan dan merupakan pilihan yang dapat diterima, akan tetapi Muslim Melayu di Thailand selatan memandang Buddhisme Thailand dan Islam Melayu memiliki dua orientasi kosmologis yang berbeda (Yusuf, 2010).

Peran ulama Melayu sebagai pemelihara tradisi agama menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam konflik tersebut. Orang pertama yang membawa ide-ide nasionalis Muslim Melayu ke Thailand selatan adalah ulama Islam Haji Sulong (1895-1954), yang adalah seorang reformis dan aktivis politik yang dididik di Mekah. Sekembalinya ke Pattani pada tahun 1930, ia terlibat dalam reformasi komunitas Muslim Melayu dan berusaha memasukkan ajaran Islam kedalam pemerintahan dengan mengupayakan otonomi politik dalam sistem federal. Pada tahun 1947, Haji Sulong membuat tujuh tuntutan yang diberikan kepada pemerintah pusat, dengan fokus pada kebebasan politik bagi orang Melayu dan pelestarian bahasa mereka. Sejak kematiannya yang misterius pada tahun 1954, Haji Sulong telah menjadi simbol perlawanan terhadap negara Thailand (Liow. JC, 2010). Setelah jeda singkat pada 1980-an dan 1990-an, konflik Thailand selatan muncul kembali pada tahun-tahun berikutnya (Yusuf, 2010).

1) Pemberontakan Thailand Selatan pada masa PM Thaksin (2001-2006)

Kemunculan kembali pemberontakan selatan, yang ditandai dengan pengeboman, penculikan, pemenggalan kepala, dan penembakan, ditanggapi dengan kekerasan oleh pemerintah Thaksin yang berkuasa saat itu. Para pejabat menggunakan kekuatan berlebihan dan memberlakukan darurat militer di pedalaman selatan. Kekerasan berlanjut, dan insiden Krue Se (28 April 2004) dan Tak Bai (25 Oktober 2004) menjadi bagian tak terhapuskan dari ingatan Muslim Melayu.

2) Pemberontakan Thailand Selatan pada masa PM Surayud (2006-2007)

Kudeta militer tahun 2006 mengambil sikap damai terhadap konflik Thailand Selatan. Perdana Menteri baru, Jenderal Surayud, meminta maaf atas kesalahan penanganan krisis oleh pemerintahan Thaksin sebelumnya. Dia juga mengumumkan

amnesti bagi mereka yang mundur dari gerakan pemberontakan. Dia berharap untuk meyakinkan generasi tua separatis dari Organisasi Persatuan Pembebasan Patani (PULO) dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) untuk memainkan peran mediasi antara pemerintah dan pemberontak muda, yang memiliki pendekatan kekerasan yang lebih radikal. Sementara Perdana Menteri Surayud tulus dalam keinginannya untuk menyelesaikan konflik selatan, politik nasional (seperti memulihkan demokrasi) menyita banyak waktu dan energinya.

3) Pemberontakan Thailand Selatan pada masa PM Samak Sundaravej dan Somchai Wongsawat (2008)

Sebagai hasil dari pemilihan umum Desember 2007, pemimpin *Phak Palang Prachachon* (PPP) Samak Sundaravej membentuk pemerintahan baru. PPP didukung oleh Thaksin, yang berada di pengasingan. Pemerintah baru mengejutkan publik ketika Menteri Dalam Negeri Chalerm Yubamrung mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk menemukan solusi baru untuk kekerasan di selatan, dan ini dapat dicapai dengan melembagakan beberapa bentuk otonomi. Pengumuman ini diterima dengan sangat antusias, tetapi proposal itu segera ditolak oleh perdana menteri. Pemerintah mengalihkan tanggung jawab atas pemberontakan selatan kepada tentara, yang telah bekerja keras dalam memadamkan kekerasan. Samak keluar dari kantor pada 9 September 2008, digantikan oleh Somchai Wongsawat. Perdana Menteri Somchai melakukan kunjungan ke Selatan pada 28 Oktober 2008, tetapi jelas bahwa tentara memegang kendali penuh, bukan pemerintah pusat. Pemerintah Somchai mengalokasikan delapan miliar baht Thailand kepada tentara untuk memerangi pemberontakan. Somchai dicopot dari jabatannya pada 2 Desember 2008.

4) Pemberontakan Thailand Selatan pada masa Abhisit Vejjiva (2011)

Selama pemerintahan Abhisit Vejjiva yang dipimpin Partai Demokrat, tentara terus mengelola wilayah selatan. Pemerintah Thailand telah melakukan pendekatan “pembangunan” untuk menyelesaikan konflik, dengan keyakinan bahwa pembangunan ekonomi akan mengakhiri konflik yang selama ini terjadi.

Saat ini, ada pembicaraan di arena politik Thailand untuk menemukan solusi politik untuk konflik tersebut, tetapi tidak ada inisiatif yang diambil. Menawarkan pemerintahan sendiri kepada Muslim selatan adalah salah satu pilihan, tetapi para pemimpin keamanan nasional khawatir bahwa otonomi akan mengarah pada tuntutan

kemerdekaan. Hingga tahun 2011, kurang lebih dari 4.500 orang yang tewas dalam krisis yang sedang berlangsung. Kelompok pemberontak di Thailand Selatan saat ini di selatan diidentifikasi dengan nama Barisan Revolusi Nasional-Koordinat (BRN-Koordinat), yang aktif sejak tahun 1990.

Artikel ini akan memberikan gambaran tentang kebijakan pendidikan Islam di negara Thailand yang selalu dilanda konflik berkepanjangan. Artikel akan menjelaskan masalah pendidikan yang terjadi sekaligus menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyusun sistem pendidikan.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode *literature review*. *Literature review* berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran tulisan tentang beberapa sumber pustaka (dapat berupa artikel, buku, slide, informasi, internet dll), tentang topik yang dibahas. Suatu literature yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir, dan memadai.

Ada lima langkah dalam menggunakan *literature review* yaitu: 1) Mencari literature yang relevan; 2) Memilih sumber yang spesifik; 3) Identifikasi detail artikel; 4) Membuat outline; 5) Menyusun literatur review. Dasar penulisan adalah sumber-sumber dan literatur baik internasional maupun nasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku, artikel literatur, jurnal dan lainnya yang relevan dengan judul penulis. Setelah dokumen dan data yang dibutuhkan terkumpul, maka penulis akan membaca, mencatat dan menganalisis dokumen dan data tersebut dan menulisnya menjadi sebuah tulisan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Islam di Pattani

Menurut Ismail Niksah Uma (2020) Pendidikan Islam di Pattani Thailand Selatan ada pendidikan Islam formal, non-formal dan informal, yang mana kita bisa mengetahui lebih jelas sebagai berikut, yaitu:

1. Pendidikan Islam formal

Pendidikan Islam formal merupakan pendidikan di sekolah yang tujuan, metode pendidikan, kurikulum, waktu belajar termasuk pengukuran dan evaluasi telah ditetapkan oleh pemerintah.

Model pendidikan Islam formal dibagi sebagai berikut:

a. Pendidikan Islam di sekolah umum

Pada tahun 1978 telah ditetapkan bagian studi pendidikan Islam yang merupakan inti dari kelompok belajar pendidikan sosial, agama dan budaya. Pendidikan Islam di tingkat dasar sekolah umum memiliki 2 karakteristik yaitu,

a) memungkinkan siswa Muslim untuk belajar studi Islam melalui studi sosial, agama dan budaya. Untuk memungkinkan siswa memahami dan mematuhi prinsip-prinsip iman, praktik, dan prinsip moral etika menjadi cara hidup dapat diimplementasikan dengan benar akan ada 1-2 jam pelajaran per minggu. b) siswa belajar studi Islam secara intensif bersama dengan mata pelajaran umum.

Dalam kurikulum inti dan pendidikan dasar tahun 2008, jam belajar pendidikan Islam ditambah menjadi 8-10 jam per minggu.

b. Sekolah swasta mengajar agama dan umum (pondok modern)

Sekolah swasta Islam adalah institusi pendidikan yang awalnya adalah pondok yang berubah menjadi sekolah swasta, dan para pengajarnya diberi nama *Tok Guru*.

Sekolah swasta Islam diklasifikasikan sebagai sekolah sesuai dengan Undang-Undang Sekolah Swasta 1982, yang terbagi menjadi 2 jenis:

1) Sekolah swasta menurut Pasal 15(1) adalah sekolah yang mengajarkan mata pelajaran agama bersama dengan mata pelajaran umum menurut kurikulum Departemen Pendidikan. Sekolah swasta Islam yang mana sesuai dengan pasal 15(1) dapat dibagi lagi menjadi 2 jenis, pertama Sekolah swasta Islam, yang dikelola oleh asosiasi atau yayasan yang merupakan badan hukum. Pemerintah mensubsidi anggaran yang akan digunakan untuk membayar 100% per orang. Jenis kedua adalah Sekolah swasta Islam, jenis yang merupakan penerima lisensi yang mana pemerintah akan mensubsidi anggaran belanja per orang serta sekolah swasta umum tetapi pemerintah akan mengirim seorang guru untuk mengajar bagian mata pelajaran umum dengan guru yang sekolah upah mengajar.

2) Sekolah swasta Islam menurut pasal 15(1) Undang-Undang Sekolah Swasta 1982, yang merupakan bagian dari pengajaran dan pembelajaran melalui studi Islam sesuai dengan kurikulum Departemen Pendidikan

dan bagian lainnya, mengajar mata pelajaran umum sesuai dengan kurikulum Departemen Pendidikan bersamaan dengan kondisi baik personel maupun sistem pembelajaran belum mencapai kriteria Departemen Pendidikan untuk meningkatkan tingkat menjadi sekolah berdasarkan Bagian 15(1) dari Undang-Undang Sekolah Swasta 1982.

Jadi bisa di simpulkan Sekolah swasta Islam adalah perubahan dari pondok menjadi tempat lembaga pendidikan yang diakui pemerintah. Dengan demikian, kurikulum, waktu belajar, dan tujuan sekolah diatur oleh pemerintah Thailand. Selain itu sekolah tersebut harus terdaftar di Kementerian Pendidikan, sebagai sebuah yayasan untuk dapat menerima subsidi pemerintah dari pemerintah untuk 100% per orang.

2. Pendidikan Islam non - formal

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk menambah ilmu, wawasan dan juga melengkapi kekurangan pada pendidikan formal (Tohiroh Saah, 2017) . Terdiri dari:

a. Pusat Pendidikan Islam di Masjid TADIKA

TADIKA merupakan kata dari bahasa Melayu berasal dari kata penuh, Taman Didik Kanak-kanak yang berarti pusat atau tempat menjaga, mengajar, melatih dan mendidik anak-anak kecil. merupakan fasilitas pengajaran agama dasar untuk anak-anak merupakan pendidikan agama dasar yang diselenggarakan untuk anak-anak di desa bagi anak-anak untuk belajar agama sebagai pendidikan konsisten dengan budaya.

Gedung yang digunakan adalah mesjid sebagai tempat belajar dan mengajar pada waktu sore hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat atau Sabtu atau Minggu sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat.

Cikgu adalah Guru adalah pemimpin agama dan sukarelawan di masyarakat dan Siswa adalah siswa di sekolah dasar di sekolah umum dan sekolah swasta. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dalam proses belajar dan mengajar sehingga membuat siswa menjadi senang belajar.

Sesuai dengan peraturan Departemen Agama, No 1 tahun 2008 tentang "Peraturan Urusan Agama tentang Pusat Pelatihan Agama Islam dan etika di masjid", dan diperkuat dengan Surat Edaran Komisi Pendidikan Swasta tahun 2012, tentang kriteria, prosedur dan ketentuan untuk alokasi subsidi

sebagai kompensasi bagi guru di Pusat Pendidikan Islam (Tadika) dan biaya manajemen untuk masjid, sebagai berikut:

No 3 : Pusat Pendidikan Islam Masjid (Tadika) dan guru yang berhak menerima subsidi berdasarkan pengumuman ini harus ditempatkan di masjid yang terdaftar di bawah undang-undang tentang pengelolaan organisasi Islam hanya dengan memberikan subsidi masing-masing tidak lebih dari 1 masjid. No 4 Kompensasi untuk guru di Pusat Studi Islam Tadika dan biaya pengelolaan masjid No 5 Pusat Pendidikan Islam Masjid (Tadika) harus mengajar dan mengevaluasi hasil studi atau belajar menurut kurikulum fardu'in Masjid 2005.

b. Pondok

Kata "pondok" diambil dari bahasa Melayu Pattani. Kata tersebut dimabil dari bahasa Arab "*Funduk*" yang berarti "pondok" atau hotel arti di sini yaitu "Institusi Studi Agama Islam". Asal mula pendidikan Islam di Pattani bermula dari kalangan masyarakat Islam yang mempelajari Al-Qur'an dan Hadist. Pengajian Al-Qur'an ini dilakukan di Mushola (*Balai Syah*), Mesjid dan rumah-rumah. Guru yang dipanggil dengan sebutan *Tok Guru Al-Qur'an* Pelajar yang belajar di pondok tersebut disebut dengan istilah "*Tuk Pake*" yang diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah orang-orang yang memiliki maksud dan tujuan terhadap ilmu pengetahuan dan bimbingan keagamaan. Pondok yang diterapkan bercorak *Madrasah* mempunyai tingkatan sebagai berikut:

- 1) *Ibtidaiyyah* : tempat belajar selama enam tahun
- 2) *Mutawasittah* : tempat belajar selama tiga tahun (menengah)
- 3) *Tsnawiyyah* : tempat belajar selama tiga tahun

c. Pendidikan Islam In-Formal

Pendidikan informal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar persekolahan atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang mana sangat dipengaruhi oleh keluarga atau pendidikan di rumah dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku seorang anak dan seorang dewasa.

B. Kebijakan pengembangan pendidikan Agama Islam di Pattani (masa pemerintah PM Pra'yut Chan'ocha tahun 2016-2019 Pasca Konflik)

Kebijakan-kebijakan pengembangan pendidikan Islam di Patani Thailand selatan yang telah diterapkan oleh pemerintah dibagikan menjadi topik besar 3 kebijakan, yaitu:

1) Kurikulum

Konstitusi Kerajaan Thailand, 2007 pasal 37 menetapkan bahwa seseorang memiliki kebebasan beragama sepenuhnya. Denominasi atau doktrin agama dan akan memiliki kebebasan untuk mematuhi hukum atau melakukan ritual kepercayaannya agar tidak menentang tugas warga dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau moral yang baik (Konstitusi Kerajaan Thailand, 2007). Dalam penyusunan kurikulum sekolah ini Pusat Pendidikan Islam di Masjid (Tadika) telah membuat kurikulum pendidikan Islam sesuai dengan arah kurikulum pendidikan Islam fardhu'in di masjid tingkat Ibrahimayah tahun 2016/ 1437 H. untuk digunakan agar sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat dan telah dipertimbangkan oleh kerjasama staf dari Pusat Pendidikan Islam di masjid (Tadika), masyarakat setempat, komite pusat masing-masing, sebagai berikut.

a. Kompetensi penting peserta didik

Kurikulum pendidikan Islam sesuai dengan arah kurikulum pendidikan Islam fardhu'in di masjid tingkat Ibrahimayah tahun 2016/ 1437 H. bertujuan untuk memberikan kemampuan peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan karakteristik Islam yang penting ada 5 hal sebagai berikut: Kemampuan membaca al-Qur'an; Kemampuan dalam praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam; Kemampuan dalam membaca, menulis, dan berkomunikasi; Kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah;

b. Materi pembelajaran dan standar pembelajaran

Kurikulum pendidikan Islam fardhu'in di masjid tingkat Ibtidaiyah tahun 2016/1437 H. Menentukan materi dan standar pembelajaran 9 materi pembelajaran dalam jumlah 6 standar sebagai berikut : 1) Materi al-Qur'an, memahami sejarah, pentingnya dan prinsip- prinsip membaca al-Qur'an bisa membaca, menghafal dan memperjelas al-Qur'an mengikuti ajaran dalam al-Qur'an dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; 2) Materi Hadits,

memahami makna dan pentingnya menghafal Hadits dengan berpegang pada ajaran Hadits dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 3) Materi Aqidah, Standar Aqidah, memahami makna, pentingnya, dan prinsip-prinsip iman dan hukuman kemitraan dengan Allah, untuk menjadi hamba yang takwa dan taat kepada Allah, berpegang teguh pada iman, bawaan belajar secara ketat dan mampu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan untuk hidup bersama dengan kebahagiaan. 4) Materi Fiqh, Standar Fiqh, memahami, hargai, ikuti aturan, prinsip dan ketentuan Islam tentang Ibadah, Mu'amalat, dan lainnya untuk menjadi jalan dalam praktik keagamaan dan dapat dianalisis dengan keadaan yang didasarkan pada alasan dan hidup dalam masyarakat yang bahagia. 5) Materi Akhlak, Standar Akhlak, memahami adab dan akhlak Islamiyah dapat digunakan untuk pengembangan pribadi memberi manfaat bagi keluarga masyarakat dan lingkungan, patuhi dan ikuti adab dan akhlak Islamiyah dengan cara hidup benar untuk hidup bersama dengan kebahagiaan; 6) Materi Sejarah, Standar Tarikh/Sejarah, memahami arti pentingnya sejarah Islam di masa Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat, bangga dengan kehidupan di bawah ajaran Nabi Muhammad SAW. dan para Sahabat. 7) Materi Basaha Arab, Standar basaha Arab, memahami proses mendengar, berbicara, membaca dan menulis, nilai-nilai dan memiliki keterampilan dalam menggunakan bahasa Arab belajar berkomunikasi, meneliti, menafsirkan ketentuan Islam dan maknanya. 8) Materi Basaha melayu tulisan yawi (Arab Melayu), Standar Basaha melayu tulisan yawi, memahami proses mendengar, berbicara, membaca dan menulis, nilai-nilai dan memiliki keterampilan dalam menggunakan bahasa Mealayu untuk belajar, menyampaikan arti dan meneliti pengetahuan dari sumber berkaitan dengan agama Islam secara kreatif dan efektif. 9) Materi Basaha melayu tulisan rumi, Standar Basaha melayu tulisan rumi, memahami proses mendengar, berbicara, membaca dan menulis, nilai-nilai dan memiliki keterampilan dalam menggunakan bahasa Mealayu tulisan Rumi, untuk belajar berkomunikasi dan menyampaikan artinya dari sumber-sumber kreatif, secara efektif dan bisa berkomunikasi dengan komunitas ASEAN.

2) Pengembangan bahasa Thai

Undang-Undang Pendidikan Nasional 1999 dalam kategori 4 adalah Pedoman Manajemen Pendidikan, Pasal 23, No. 4 yaitu “Pengetahuan, keterampilan dalam matematika dan bahasa, berfokus pada penggunaan bahasa Thai dengan benar” Masyarakat Patani belum bisa belajar bahasanya secara maksimal hal ini disebabkan karena Pattani adalah negara jajahan Thailand yang asal mulanya bersuku Melayu.

3) Pengembangan Guru dan Kependidikan

Undang-Undang Pendidikan Nasional 1999 dalam Lembaran Kerajaan, Kategori 7 Guru, tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan. Pasal 52 Kementerian akan mempromosikan sistem Proses produksi, pengembangan guru, tenaga pengajar dan tenaga kependidikan untuk memiliki kualitas dan standar yang sesuai untuk tingkat profesional yang tinggi dengan mengawasi dan berkoordinasi dengan lembaga yang Tugas memproduksi dan mengembangkan guru, fakultas, termasuk tenaga kependidikan agar siap dan kuat dalam persiapan tenaga baru dan pengembangan tenaga reguler. Pemerintah wajib mengalokasikan dana dan menyediakan dana untuk pengembangan guru, tenaga pengajar dan tenaga kependidikan secara memadai.

Pelaksanaan pendidikan Islam di Thailand berubah dari Mesjid, Pesantren tradisional, sekolah, *madrasah* (sekolah), hingga modern Pesantren (Swasta). Pada awal Islam di Pattani, masjid digunakan sebagai lembaga pendidikan agama. Pembelajaran yang dilakukan di masjid terfokus tentang mengajar Al-Qur'an, mempelajari buku *Jawi*, belajar *Berzanji*, belajar menjadi imam Shalat, dan shalat secara berjamaah.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Thailand melalui kebijakannya, mengubah Pesantren menjadi Sekolah Swasta Islam atau sekolah Asrama Modern yang harus berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian yang kemudian dijanjikan dengan bantuan dana dari pemerintah. Kebijakan pemerintah Thailand tersebut untuk mereformasi sistem pendidikan Islam yang pada akhirnya berdampak pada perubahan kurikulum pesantren, yaitu ciri khas pendidikan Islam. Kemudian pemerintah menetapkan standarisasi guru yang bisa mengajar pada sekolah Islam (Aree, 2016).

Kebijakan pemerintah Thailand untuk mereformasi sistem pendidikan Islam adalah hanya untuk menyalurkan keinginan politik pemerintah. Sekolah Swasta Islam atau Pesantren modern di Pattani diharuskan mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah membuat kurikulum yang terintegrasi antara materi agama Islam dengan materi umum dan juga tentang nasionalisme dan budaya agama Budha (Forbes, 1953). Pemerintah mengharapkan integrasi antar agama dan bidang umum dalam kurikulum akan menimbulkan keseimbangan antar agama. Dengan integrasi antara agama Islam, nasionalisme dan budaya agama Buddha diharapkan kesadaran berbangsa dan bernegara akan muncul pada masyarakat Islam, sehingga meminimalkan sikap pemberontak yang memicu disintegrasi bangsa .

Pemerintah juga membangun stigma bahwa pendidikan agama yang tidak terintegrasi merupakan bagian dari separatisme. Stigma yang dibangun ini (Jelonek, 2012) membuat orang Thailand tidak bebas. Mereka bahkan dicap sebagai teroris (Croissant & Barlow, 2007). komunitas Muslim, beberapa kali mendapat stigma seperti yang terjadi di Xinjiang (Warikoo, 2000). Hal ini disebabkan oleh kesenjangan informasi. Adanya kesenjangan antara administrasi pemerintahan dan masyarakat menyebabkan kesenjangan informasi terjadi (Ikelegbe, 2005).

Proses pendidikan Islam, diperkenalkan oleh Haji Sulong dan Ismail Luthfi (Joseph Chinyong Liow, 2010). Ada integrasi antara sistem nasional dan aspirasi lingkungan (Aree, 2016). Meskipun ada persepsi bahwa orang-orang Pattani dipandang berjuang untuk etnis (Harish, 2006), hanya saja mereka mencoba menyediakan tempat belajar agama sesuai dengan keyakinan mereka. Ada modernisasi pendidikan yang dimulai dua puluh tahun yang lalu (Provencher, 1989). Meskipun dalam perkembangannya modernisasi, ada aspek pembangunan yang menjadi kendalanya (Scupin, 1989). Demikian juga, di tengah upaya pembangunan, ada tantangan kekerasan dan pandangan negatif (Poath, 2014). Perkembangan islam pendidikan menjadi sarana untuk bernegosiasi antara identitas (JC Liow, 2005). Bahkan dari dulu udah ada perkembangan yang didahului oleh saling curiga sekaligus tantangan (Yusuf, 2010). Pendidikan Islam sedunia merupakan perpaduan antara tradisi dan modernisasi (Wekke, 2015). Artikel ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam Pattani Thailand adalah menjalani baik kelembagaan maupun transformasi manajemen. Juga, adanya integrasi antar bangsa kepentingan dan aspirasi lingkungan berkaitan dengan kebutuhan etnis dan agama.

SIMPULAN

Kebijakan pengembangan pendidikan Islam di Patani masa pemerintah perdana menteri Pra'yut Chan'ocha pada tahun 2016-2019 dapat kebijakan pendidikan Islam di Patani Thailand selatan ada 3 kebijakan dalam satu priode ini yaitu; kebijakan kurikulum, kebijakan pengembangan bahasa Thai dan kebijakan pengembangan guru dan tenaga kependidikan dikarana kebijakan ini yang terkait dengan pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan. Akan tetapi kebijakan tersebut masih belum berjalan dengan lancar karena pemerintah memiliki maksud tersembunyi dengan cara mengintegrasikan agama Islam, nasionalisme dan budaya agama Buddha. Bagi umat Muslim di Thailand, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agamanya sesuai dengan surat QS Al Kafirun : 4, *Lakum Diinukum Wa liya Diin*, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aree, S. (2016). Integrated Islamic Education in Southern Thailand and Northern Malaysia: Reforms and Challenges. *Journal of Human Rights and Peace Studies*, 2(2), 75–106.
- Bafadhol, I. (2016). Pendidikan Agama Islam (PAI) di Islamic Boarding School. *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 05, 1371–1390.
- Croissant, A. (2007). Muslim Insurgency, Political Violence, and Democracy in Thailand. *Terrorism and Political Violence*, 19, 1–18.
- Croissant, A., & Barlow, D. (2007). Following The Money Trail: Terrorist Financing and Government Responses in Southeast Asia. *Studies in Conflict & Terrorism*, 30(2), 131–156.
- Forbes, Andrew D. W., 1953, Thailand's Muslim Minorities: Assimilation, Secession, or Coexistence?. *Far Eastern Survey* 1 October 1953; 22 (11): 1056–1073. doi: <https://doi.org/10.2307/2643979>
- Gilqui, Michael., 2005, *The Muslim of Thailand*, IRASEC, Michigan University
- Harish, S. P., 2006, Ethnic or Religious Cleavage? Investigating The Nature of The Conflict in Southern Thailand. *Contemporary Southeast Asia*, 48–69.
- Helmiati, 2014, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Edisi 1, Cetakan 1, LPPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Ikelegbe, A., 2005, The Construction of A Leviathan: State Building, Identity Formation and Political Stability In Nigeria. *The Crisis of The State and Regionalism in West Africa*, 71–92.
- Jelonek, A. W., 2012, The Dynamics of Ethno-religious Separatism in Southern Thailand. *Księgarnia Akademicka*, (20/1), 135–154.

- Joll, C. M., 2010, Religion and Conflict in Southern Thailand: Beyond Rounding Up the Usual Suspect. *Contemporary South East Asia*, 32(2).
- Jory, P., 2006, Religious Labelling From Patani Malayu To Thai Muslim. *Jurnal ISIM*, 18(autumn). Kesuma, G. C. (2017). Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini. *Tadris:Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 02(1), 67–79.
- Liow, Joseph Chinyong., 2010, Religious Education and Reformist Islam in Thailand's Southern Border Provinces: The Roles of Haji Sulong, Abdul Kadir and Ismail Lutfi Japakiya, *Journal of Islamic Studies*, Nomor : 1, Volume : 21, Halaman : 29-58, DOI:10.1093/jis/etp026
- Madmam, H., 2003, Secular Education, Values and Development in The Context of Islam in Thailand: An Outlook on Muslim Attitudes Toward Thai Educational Policy. *Asian Interfaith Dialogue.Perspectives on Religion, Education and Social Cohesion*, 66–77.
- Niksah Uma, 2020, Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam Di Patani Thailand Selatan (Analisis Masa Pemerintah Perdana Menteri Pra'yut Chan'ocha 2016-2019), *Tesis*, UIN Antasari, Banjarmasin
- Ramizah Wan Muhammad. 2008, The Muslim of Thailand by Michael Gilquin, *Intellectual Discourse*, Nomor : 2, Volume : 16
- Tohiroh Saah, 2017, Pendidikan Islam di Pattani Selatan dalam perspektif Historis, *Tesis*, UIN Raden Intan, Lampung
- Yusuf Imtiyaz, 2010, Islam and Buddhism Relations from Balkh to Bangkok and Tokyo, *The Muslim World*, Nomor : 2, Volume : 100, Hal. 177-186, DOI : 10.1111/j.1478-1913.2010.01312.x